

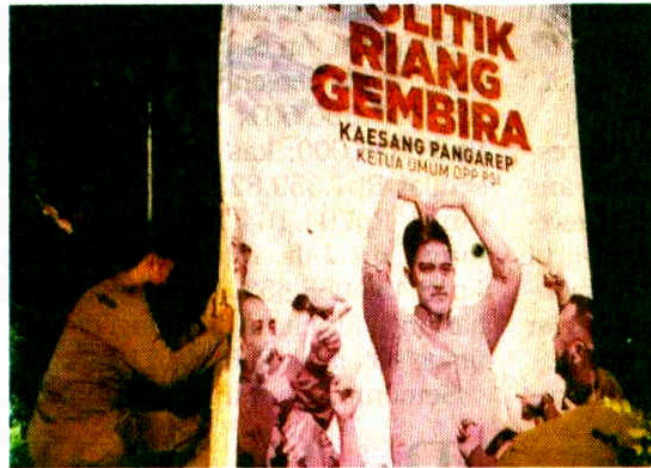


PSI Terbanyak

● Ratusan Reklame Parpol Ditertibkan

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta menegaskan tidak tebang pilih dalam melaksanakan penertiban reklame, termasuk kategori alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2024. Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat mengatakan, sejak Peraturan Wali Kota Yogya No 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2022 ditetapkan, pihaknya rutin melakukan penertiban reklame.

Tercatat, berdasarkan data sejak Mei-14 November 2023, pihaknya telah menertibkan 6.175 reklame, yang



DOK. SATPOL PP YOGYA

DITINDAK - Reklame atau alat peraga sosialisasi PSI yang ditindak oleh personel Satpol PP Kota Yogya.

● ke halaman 11

PSI Terbanyak

• Sambungan Hal 1

967 di antaranya merupakan reklame atau alat peraga sosialisasi peserta pemilu. Octo merinci, alat peraga yang diterbitkan itu bergambar logo partai, PSI (270 alat peraga), PAN (124), Gelora (113), PDI Perjuangan (105), PPP (43), Golkar (43), Nasdem (36), PKS (33), Ummat (28), PKB (21), Demokrat (19), dan Gerindra (6). "Jadi, ini sudah kegiatan rutin. Sekarang belum masa kampanye, semua kita tertibkan, tidak ada tebang pilih," ucapnya, Jumat (17/11).

Ia memaparkan, ada perbedaan yang harus dipahami oleh masyarakat terkait pemasangan alat peraga sebelum masuk masa kampanye, yang baru dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Sebelum masuk masa kampanye, Satpol PP masih berpedoman pada Perda No 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. "Sehingga, tidak ada kewajiban kami untuk koordinasi dengan Bawaslu. Mereka baru bekerja ketika sudah masuk masa kampanye," ucap Octo.

Sementara, Peraturan Wali (Perwal) Kota Yogyakarta No 75 Tahun 2023, tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pemilu bakal disosialisasikan tersendiri oleh KPU. Nantinya, penindakan alat peraga selama masa kampanye menjadi kewenangan Bawaslu, dengan fasilitasi penuh dari Satpol PP. "Bawaslu stakeholder utama penegakan dan Satpol PP jadi *supporting*. Ini, kita lakukan

saat masuk masa kampanye," ujarnya.

Menghormati

Ketua DPW PSI DIY, Kamaruddin menegaskan, pihaknya menghormati penuh upaya penegakan aturan yang dilakukan Satpol PP. Ia pun mempersilakan aparaturnya untuk melanjutkan langkah penertiban jika memang dijumpai reklame PSI yang melanggar ketentuan. "Kita apresiasi apa yang dilakukan Satpol PP, kita hormat, kok. Apabila kita salah, kita minta maaf. Kita partai anak muda, siap dibimbing," jelasnya.

Kamaruddin menjelaskan, sejatinya DPW PSI DIY sudah mempunyai tim yang diterjunkan ke lapangan untuk menyosialisasikan aturan terkait reklame. Hanya saja, ia tidak dapat membendung antusiasme para kader dan calon legislatif, untuk mengenalkan partainya kepada masyarakat di Kota Pelajar.

"Sudah kita sosialisasikan. Tapi, semangat untuk menang di 2024 sangat tinggi. Sehingga, terkadang itu menjadi di luar kontrol kita, ya," ungkapnya. "Apalagi, caleg PSI di Kota Yogya sekarang *full*. Mereka anak-anak muda yang kerjanya militan sekali. Mereka sangat serius itu," urai Kamaruddin.

Meski demikian, ia berharap, Satpol PP tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan reklame atau alat peraga peserta Pemilu yang melanggar peraturan. Menurutnya, selama peraturan tersebut diterapkan untuk semua partai tanpa diskriminasi, DPW PSI DIY pun

sama sekali tidak keberatan atributnya ditindak. "Tidak ada masalah, asal jangan tebang pilih penindakannya," pungkasnya.

Minta kejelasan

Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Ganjar Yogya, mendatangi Kantor Satpol PP Kota Yogya, di kompleks Balai Kota Yogya, Jumat (17/11) pagi. Kedatangan tersebut, bermaksud untuk meminta kejelasan terkait aktivitas penertiban rontek Alat Peraga Sosialisasi (APS) Capres Ganjar Pranowo oleh jajaran Satpol PP tempo hari.

Perwakilan Aliansi Relawan Ganjar Yogya, Antonius Fokki Ardiyanto, bertanya-tanya mengapa pencopotan APS dilakukan tepat di hari kedatangan Ganjar Pranowo ke Yogya, Rabu (15/11). Ia mencurigai, ada keterlibatan atau instruksi dari pihak-pihak lain, karena pola penertiban semacam itu terjadi juga di beberapa daerah. "Situasinya sama, ketika Pak Ganjar datang di suatu kota, ya, gambar-gambar Pak Ganjar itu dicopoti seperti itu," ucapnya.

Terlebih, Fokki menyebut, selama ini Satpol PP sama sekali tak pernah melakukan sosialisasi terkait aturan pemasangan atribut sosialisasi ataupun kampanye, kepada parpol maupun relawan. Sehingga, para simpatisan di akar rumput sama sekali tidak memahami aturan soal Perda penyelenggaraan reklame menjelang Pemilu dan Perwal pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye).

"Harusnya tetap ada sosi-

alisasi mengundang partai politik dan relawan. Semua relawan-relawan itu, kan, sudah terdaftar di KPU," ujarnya. "Dengan ngomong semuanya dianggap tahu ini, kan, tidak bijaksana. Padahal, kalau tidak ada koordinasi, timbulnya syak wasangka," urai Fokki.

Bukan sengaja

Kepala Satpol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, yang menemui peserta aksi, mengatakan, bahwa pencopotan rontek di hari kedatangan Ganjar Pranowo itu bukan kesengajaan. Apalagi, pihaknya tak memperoleh informasi apa pun, sehingga tidak tahu-menahu mengenai agenda calon presiden nomor urut tiga itu di wilayah DIY. "Kami rutin setiap hari melakukan penertiban. Terus terang, bukan hanya (APS) Pak Ganjar yang kita tertibkan, tapi semua (APS) capres-cawapres," tegasnya.

Benar saja, berdasarkan data yang dihimpun Satpol PP Kota Yogya, secara keseluruhan terdapat 69 alat peraga sosialisasi capres yang diterbitkan. Dengan rincian, 45 alat peraga Ganjar Pranowo, 17 alat peraga Prabowo Subianto, serta 7 alat peraga bergambar Anies Baswedan. "Aturannya, karena belum masuk masa kampanye, jika tidak memenuhi prosedur perizinan kami lakukan penghentian fungsi reklame," urainya. "Sekarang ini belum mulai penertiban APK, tapi penertiban reklame. Kita memakai Perda reklame dan aturan itu ketika sudah diundangkan, semua dianggap tahu," pungkaskan Octo. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005